

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL MIGRAN

(Social Welfare Problem of Low Income Migrants :Case Study In Prawirodirjan Yogyakarta)

— Studi Kasus di Kelurahan Prawirodirjan Kota Yogyakarta —

Nina KARININA

ABSTRACT

This paper concerned with the condition of the social welfare problems of the low income migrants living in Prawirodirjan Yogyakarta. The case study of that migrants showed that their main social welfare problems related to low income for supporting their family, such as children education fee, and inappropriate house to stay. Although they tried to cope with those problems, but most of them had no successful yet. Social services both from local and national government had not been specially programmed for them. Nevertheless, some of them gained several services which were integrated in public social welfare programmes through "social safety net programmes" in the form of health services, school fee, low cost rice price, etc.

Key Words: empowering, social welfare, migrant.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus migrasi ke kota besar di Indonesia pada dekade terakhir dapat diketahui dari data statistik sebagai berikut: Pada tahun 1995 dari 194.754.808 penduduk Indonesia 69.937.110 orang atau 35,91 % tinggal di daerah perkotaan (Anonim,1995) Kemudian pada tahun 2001 dari 201703537 orang sebanyak 86986625 orang (43,13%) tinggal di kota, dan sebagian besar yaitu 114716912 (56,87%) tinggal di pedesaan. Dengan demikian dalam kurun waktu antara 1995-2001 penduduk perkotaan meningkat sebesar

5,22 %. (Anonim,2002, hlm. 16-17).

Di wilayah kota dengan adanya migrasi masuk secara positif antara lain menumbuhkan struktur ekonomi yang bervariasi seperti usaha kewiraswataan di bidang properti, jasa, dan di sektor informal. Dari segi negatif dapat dilihat dengan adanya masalah kesehatan lingkungan, pemukiman kumuh, pengangguran atau pergelandangan, kemacetan lalu lintas, dan perilaku sosial yang menyimpang.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut data statistik pada tahun 1999 diketahui bahwa dari seluruh penduduk yang jumlahnya 3.264.920 orang, sebanyak 186.414 atau 57,11%

tinggal di daerah pedesaan, dan 1.400.328 atau 42,89% tinggal di perkotaan. Bilamana dibandingkan dengan keadaan penduduk pada tahun 1995, diketahui bahwa dari 3.154.265 orang diketahui bahwa penduduk DIY, sebanyak 1.804.157 orang atau 57,20% tinggal di pedesaan, sedangkan 1.350.108 orang atau 42,80% tinggal di perkotaan (Anonim,1999,hal.89). Dengan demikian dalam waktu empat tahun penduduk perkotaan di DIY naik sebesar 0,09%.

Ada berbagai alasan dalam memutuskan untuk migrasi. Berdasarkan data hasil survei antar sensus tahun 1995 terdapat migran risen antar desa yaitu tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu. Alasan-alasan utama bagi migran risen antar desa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan migrasi khususnya (migrasi antar desa) di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 36,7% karena alasan keluarga, 16,5% alasan pekerjaan, 2,4% mencari pekerjaan, 37,3% pendidikan, dan 7,1% alasan lainnya (Anonim,1995, hlm.51).

Migrasi penduduk yang telah terjadi di kota Yogyakarta dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga kota baik bagi penduduk setempat yang sudah lama menetap di sana maupun kaum migran, tetapi juga telah meningkatkan beban tugas pemerintah kota terkait dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Kota Yogyakarta secara administratif pemerintahan meliputi 14 wilayah Kecamatan dan 45 wilayah Kelurahan. Dari 5 daerah tingkat dua yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta, kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi menurut data hasil registrasi penduduk pada tahun 1998 ternyata jumlah penduduknya berada pada

peringkat ke empat dari yang paling banyak dibandingkan dengan 4 daerah tingkat dua lainnya di wilayah provinsi tersebut .(Kabupaten Sleman berpenduduk 824.266, Bantul 760.891, Gunungkidul 734.292, Yogyakarta 460.954 , dan Kulonprogo 435.225) (Anonim,1998,hlm.14) Ditinjau dari segi kepadatan penduduk, di kota Yogyakarta rata-rata 14.799 orang per kilometer persegi .Dengan demikian kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah tingkat dua lainnya, yaitu di Sleman hanya 1.434, Bantul 1.501, Kulonprogo 742, dan di Gunungkidul 496 (Anonim,1998,hlm.20).

Diperkirakan arus migrasi penduduk dari berbagai daerah pedesaan yang ada di wilayah D.I. Yogyakarta akan terus berlanjut sehingga kepadatan penduduk di kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi akan bertambah padat.

B. Permasalahan

Secara umum permasalahan masyarakat migran di kota Yogyakarta berkait dengan permasalahan berlanjutnya migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke kota dengan maksud untuk berusaha memperbaiki kesejahteraan mereka. Bagi pemerintah kota setempat tantangan yang dihadapi di bidang sosial adalah masalah kesejahteraan penduduk yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak sosial di suatu saat. Penanganan masalah-masalah kesejahteraan bagi migran pada saat penelitian ini dilaksanakan belum terpolakan program secara khusus. Guna mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di kota Yogyakarta yang lebih baik di masa depan antara lain diperlukan informasi tentang masalah migran.

Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana kondisi permasalahan kesejahteraan sosial migran di kota Yogyakarta, serta upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat maupun Dunia Usaha serta kaum migran sendiri di daerah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ?

C. Tujuan Penulisan makalah

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh keluarga kaum migran di perkotaan berkaitan dengan anak Balita, remaja, keluarga, dan lanjut usia;
2. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan baik oleh para migran, maupun oleh pemerintah daerah setempat dalam mengatasi permasalahan yang dialami Balita, remaja, keluarga, dan lanjut usia;
3. Mengidentifikasi sumber daya sosial dan potensi kesejahteraan dalam rangka pemecahan masalah yang ada di masyarakat setempat.

D. Kerangka Teori

Ada berbagai definisi migrasi yang dirumuskan oleh berbagai pakar di bidang ilmu pengetahuan sosial. Salah satu di antaranya dikemukakan oleh pakar antropologi dari universitas Indonesia yang mengemukakan bahwa: " migrasi adalah perpindahan sekelompok manusia dari suatu tempat tinggal ke tempat tinggal yang baru" (Koentjaraningrat, 1974, hlm. 142). Selanjutnya dikemukakan bahwa migrasi manusia diketahui sudah biasa

terjadi sejak zaman pra sejarah. Ditinjau dari segi gerak migrasi tersebut dapat dilihat adanya migrasi yang lambat dan migrasi yang cepat. Gerak migrasi yang lambat dapat diamati pada kelompok masyarakat yang hidup dari meramu dan berburu seperti ditemukan pada berbagai masyarakat terpencil di hutan, di mana mereka selalu berpindah tempat bilamana sumber daya hutan yang ada di tempat tinggalnya sudah tidak ada lagi. Migrasi yang berlangsung dengan cepat dan mendadak diakibatkan oleh berbagai macam peristiwa seperti bencana alam, perubahan mata pencaharian hidup, peperangan (Koentjaraningrat, 1974, hlm. 142-145).

Dalam kaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial, migrasi dapat dilihat dari masalah pemenuhan kebutuhan komunitas migran dapat dikemukakan suatu pendapat tentang timbulnya suatu masalah kesejahteraan sosial yaitu bahwa masalah-masalah kesejahteraan dapat berpangkal pada sebab-sebab dari dalam individu (intrinsik) dan sebab-sebab dari luar individu (ekstrinsik). Menurut T. Sumarno Nugroho, pada hakekatnya permasalahan kesejahteraan sosial timbul karena manusia tidak terpenuhi kebutuhannya (Nugroho, Sumarno, T., 1987, hlm. 11). Berbagai masalah kesejahteraan bentuknya antara lain kesulitan ekonomi, ketidakmampuan penyesuaian diri, kondisi kesehatan yang buruk, minimnya pengelolaan pelayanan sosial yang tidak baik. Masalah-masalah seperti tersebut membentuk kualitas hidup yang rendah.

Masalah kesejahteraan sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang merupakan salah satu kegagalan atau kesulitan mereka dalam melaksanakan fungsinya. Bilamana dalam suatu tatanan masyarakat terdapat banyak penduduk

atau orang-orang yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, maka hal tersebut perlu segera ada peran pemerintah bersama masyarakat untuk mencari solusi yang tepat.

Istilah kesejahteraan sosial sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pada Bab I pasal 2 ayat (1) adalah: *"suatu tata kehidupan dan penghidupan yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesuksesan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila"*. Selanjutnya pada bab III pasal 8 Undang-Undang tersebut juga dicantumkan bahwa: *"masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan."*

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di antara para migran di daerah kota Yogyakarta yang didasari oleh makna seperti dirumuskan pada pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang kondisi para migran tersebut seperti mengenai kesehatannya, pendidikan anak, sosial ekonomi, serta berbagai sumber dan potensi kesejahteraan yang ada di sekitarnya.

Dalam kaitan perencanaan sosial, untuk melaksanakan peran perencana di bidang pelayanan sosial maka

perencana tersebut perlu memahami kondisi masyarakat yang sedang ditangani dengan cara mengidentifikasi secara lengkap berbagai unsur di dalam masyarakat tersebut yang kenyataannya sangat bervariasi dan saling terkait. Demikian juga perlu diketahui bagaimana pengaruh unsur-unsur tersebut satu sama lain. Selanjutnya perencana sosial harus memformulasikan, memilih, dan mengukur pengaruh-pengaruh dari unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat tersebut dalam praktek, serta menyesuaikannya bilamana dianggap perlu. Oleh karena itu untuk menyusun suatu perencanaan yang berkaitan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial keluarga migran harus didasarkan pada pengetahuan tentang kondisi masalah kesejahteraan sosial migran yang bersangkutan. Di sisi lain untuk memahami kondisi migran diperlukan informasi yang lengkap. Informasi yang dihasilkan oleh suatu survei dapat dimanfaatkan untuk menganalisis masalah agar ada pengertian yang maksimal tentang kondisi dan hubungan-hubungan yang ada di berbagai komponen masalah migran yang bervariasi.

Pada umumnya masalah migran perkotaan identik dengan dengan masalah kemiskinan kota, dan masalah tersebut berkait dengan masalah di pedesaan. Dengan demikian ruang lingkup masalah migran bukan saja menjadi masalah kota tetapi masalah nasional yang berkaitan dengan ketimpangan sosial ekonomi. Warga masyarakat yang hidup dengan penghasilan yang minim dapat mengalami berbagai masalah kesejahteraan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok seperti tidak tercukupinya

kebutuhan makan, perumahan yang tidak layak, pakaian tidak tercukupi, kondisi kesehatan buruk.

Kiranya dalam peningkatan kehidupan kelompok komunitas migran yang berpenghasilan marginal harus lebih ditekankan pada penggunaan metode perbaikan sosial ekonomi yang terarah sesuai kondisi masalahnya dengan menerapkan peningkatan swadaya sosial ekonomi baik bagi perorangan maupun kelompok melalui bimbingan organisasi masyarakat (community organization), dan mengembangkan pelayanan sosial dengan menerapkan pelayanan case work dalam upaya memberikan pelayanan profesional bagi keluarga yang memiliki permasalahan cukup sulit.

E. Metode Penulisan

Makalah ini didasarkan pada hasil penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial migran di kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2001. Untuk menggali data tentang permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi para migran di kota Yogyakarta, serta upaya-upaya apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat serta masyarakat, digunakan bentuk penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah studi kasus komunitas, dengan maksud untuk mencari solusi permasalahan yang disandang oleh para keluarga migran. Studi kasus komunitas migran dalam hal ini adalah pengumpulan informasi yang memadai secara sistematis tentang komunitas migran yang dapat memberikan suatu gambaran tentang kehidupan komunitas migran yang sedang diteliti secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam hal ini penggunaan studi kasus dianggap

lebih tepat mengingat hal tersebut banyak digunakan dalam pekerjaan sosial.

Dalam memahami kasus permasalahan migran di Kelurahan Prawirodirjan tersebut teknik pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara dan pengamatan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial maupun lingkungan fisik di mana para migran bertempat tinggal serta analisis berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan migran sebagai data sekunder.

Teknik pengambilan responden ditentukan secara purposif yaitu mereka yang sudah lama menetap di sana minimal enam tahun. Cara ini ditempuh dengan perkiraan bahwa mereka dapat mengetahui dan mengalami berbagai masalah sosial yang dialami. Dari 2520 orang migran yang berada di kelurahan tersebut diambil sebanyak 30 orang responden Kepala Keluarga. Responden lainnya dari Tokoh Masyarakat dan staf instansi terkait (Ketua LKMD, Ketua RT, Ketua RW, Pengusaha, Lurah, dan Staf Dunas Sosial Kota Yogyakarta) sebanyak 6 orang dengan demikian semuanya berjumlah responden semuanya berjumlah 36 orang. Responden Kepala Keluarga migran tersebut mewakili empat wilayah RT dan dua wilayah RW. Penentuan lokasi difokuskan pada daerah Kelurahan yang berada di pusat kota, untuk itu ditentukan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan kota Yogyakarta.

II. GAMBARAN UMUM KELURAHAN PRAWIRODIRJAN

A. Letak Geografis Dan Administrasi Pemerintahan

Secara geografis Kelurahan Prawirodirjan terletak di wilayah pusat pemerintahan kota Yogyakarta. Jarak dari ibu kota Daerah Tingkat I hanya 2 km. Jarak dari pemerintahan Kecamatan 1,2 Km. , sedangkan jarak dari ibu kota Daerah Tingkat II Yogyakarta 2,5 Km. Ketinggian wilayah Kelurahan ini adalah 114 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 2000-3000 mm per tahun. Suhu udara rata-rata antara 23^o - 30^o C (Anonim,2001,hlm.1).

Kelurahan Prawirodirjan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Tingkat II Yogyakarta. Luas wilayah Kelurahan tersebut meliputi 45,2625 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan, di sebelah selatan Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergansan, di sebelah barat Kelurahan Panembahan Kecamatan Keraton, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergansan (Anonim,2001,hlm.1).

B. Prasarana

Prasarana yang tercatat di Kelurahan Prawirodirjan menurut keadaan bulan Juni tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Peruntukan

Jalan	: 3.900 Ha;
Bangunan Umum	: 7.3100 Ha.
Permukiman atau perumahan	: 33,7900 Ha.
Lain-lain	: 0,2625 Ha.

Penggunaan Industri	: 1,7300 Ha.
Pertokoan/perdagangan	: 7,800 Ha.
Perkantoran	: 1,4800 Ha.
Pasar desa	: 0,4800 Ha.
Tanah wakaf	: 0,900 Ha.
Tanah yang belum dikelola	: 32,8725 Ha.
(Anonim,2001,hlm.2).	

2. Prasarana Pendidikan

Ditinjau dari segi prasarana pendidikan yang ada di Kelurahan ini sudah tersedia gedung-gedung mulai dari tingkat TK sampai SMTA yang jumlah masing-masing sebagai berikut (Anonim, 2001,hlm.8):

- Gedung TK ada 5 buah, semuanya adalah milik swasta;
- Gedung SD berjumlah 5 buah, yang dikelola oleh swasta 4 buah dan 1 buah milik negeri;
- Gedung SMTP ada 2 buah, yang masing-masing 1 buah milik negeri dan 1 buah milik swasta;
- Gedung SMTA sebanyak 4 buah semuanya milik swasta.

Selain tempat pendidikan formal seperti tersebut di atas, ada juga tempat pendidikan non formal yaitu tempat kursus setir mobil.

C. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Dan Penggolongan Penduduk Berdasarkan Usia

Berdasarkan data yang dihimpun pada monografi Kelurahan Prawirodirjan, penduduk berusia dewasa di Kelurahan ini jumlahnya lebih besar dibandingkan usia muda. Untuk mengetahui penggolongan usia tersebut secara lebih terperinci di

Kelurahan Prawirodirjan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Penduduk Kelurahan Prawirodirjan Berdasarkan Usia Tahun 2001

No	Usia	Frikuensi	%
1	0 - 3 tahun	876	7,31
2	4 - 6 tahun	817	6,81
3	7 - 12 tahun	1057	8,82
4	13 - 15 tahun	538	4,49
5	16 - 18 tahun	867	7,23
6	> 19 tahun	7834	66,34
	Jumlah	11.986	100,00

Sumber: Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, hlm 3

Pengelompokan penduduk berdasarkan usia tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Penduduk Prawirodirjan Berdasarkan Usia Tenaga Kerja Pada Tahun 2001

No	Usia	Frikuensi	%
1	10 - 14 tahun	876	8,95
2	15 - 19 tahun	1.458	14,90
3	20 - 26 tahun	2.155	22,02
4	27 - 40 tahun	2.369	24,21
5	41 - 50 tahun	1.684	17,21
6	> 57 tahun	1.243	12,70
	Jumlah	9.785	100,00

Sumber: Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, hlm 3

2. Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan

Sesuai dengan karakteristik penduduk perkotaan yang sifatnya heterogin, antara lain di sana tercatat ada 45 orang atau 0,375% dari seluruh penduduk adalah warga keturunan asing.

3. Penduduk Berdasarkan Agama

Dari seluruh penduduk yang ada di Kelurahan ini berdasarkan

penggolongan agama yang paling banyak adalah beragama Islam, yaitu sebanyak 9056 orang atau 78,01%. Agama lainnya adalah: Kristen Protestan 1169 orang (10,01%), Katholik 1250 orang (10,27%), Hindu 29 orang (0,25%), dan Buddha 104 orang (0,90%).

4. Pendidikan

Ditinjau dari segi kondisi pendidikan, yang paling banyak adalah yang berpendidikan SD yang meliputi 29%. Secara terperinci tingkat

pendidikan yang dicapai seperti tercantum pada tabel 3. (Anonim,2001,hal.4).

Tabel 3
Penduduk Prawirodirjan Berdasarkan Pendidikan Pada Tahun 2001

No	Tingkat Pendidikan	Frikuensi	%
1	TK	517	14
2	SD	1.057	29
3	SMP/SLTP	538	15
4	SMA/SLTA	867	21
5	Akademi (D1-D3)	321	9
6	Sarjana (S1-S2)	314	9
Jumlah		3617	100,00

Sumber: Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, hal 4.

5. Pekerjaan

Ditinjau dari segi pekerjaan, penduduk Kelurahan Prawirodirjan hanya 2810 orang yang tercatat mempunyai pekerjaan yang meliputi: Pegawai negeri Sipil sebanyak 354 orang atau 12,60%, ABRI 3 orang atau 0,1 %, karyawan swasta 1.154 orang atau 41,07%, wiraswasta 655 orang atau 23,31%, pertukangan 182 orang (6,48%), jasa 61 orang (2,17 %), pensiunan 410 orang (14,27 %) (Anonim,2001,hal.4).

6. Mutasi Penduduk

a. Kelahiran Dan kematian

Berdasarkan data bulan Juni tahun 2001, jumlah kelahiran di Kelurahan Prawirodirjan berjumlah 73 orang. Untuk mengetahui angka kelahiran secara kasar di Kelurahan ini dengan menggunakan rumus (Barclay,G,W,1983,hal 56):

$\frac{B.K.}{P}$, di mana

P

B = jumlah seluruh kelahiran yang tercatat selama tahun kalender (tanggal 1 Januari sampai 31 Desember)

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun;

K = 1.000

dengan demikian angka kelahiran di Kelurahan ini dalam tahun 2001 adalah

$$\frac{73 \times 1000}{11608} = 6.20$$

Sedangkan jumlah warga yang meninggal dunia sampai dengan bulan Juni tahun 2001 berjumlah 31 orang. Dengan menggunakan rumus

$\frac{D.K}{P}$

P

maka angka kematian adalah :

$$\frac{31 \times 1000}{11608} = 2,60$$

11608

di mana D = jumlah seluruh kematian yang tercatat selama tahun kalender (tanggal 1 Januari sampai 31 Desember);

P = jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun (tanggal 1 Juli).

K = 1.000.

b. Migrasi

Ditinjau dari segi migrasi penduduk, diketahui bahwa migrasi masuk di Kelurahan Prawirodirjan pada tahun 2000 berjumlah 252 orang, sedangkan migrasi ke luar adalah 174 orang (Anonim,2000,hal.27). Dengan demikian dibandingkan dengan migrasi ke luar ternyata di Kelurahan Prawirodirjan jumlah migrasi masuk lebih tinggi. Oleh karena itu dalam mengantisipasi perkembangan penduduk kota Yogyakarta dan khususnya di Kelurahan Prawirodirjan di masa mendatang perlu dipersiapkan perencanaan sosial yang memadai sejak dini untuk mengatasi kemungkinan timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial di kemudian hari.

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Khusus di Kelurahan Prawirodirjan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial Tingkat I DIY, dari 11.608 orang penduduk Kelurahan Prawirodirjan di sana terdapat enam jenis PMKS. Secara terperinci ke enam jenis PMKS tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyandang Cacat

Dibanding dengan jumlah penduduk, di Kelurahan Prawirodirjan dengan demikian ada 65 orang penyandang cacat atau 0,52% dari seluruh penduduk, dengan kecacatan sebagai berikut: cacat tubuh 33 orang (50,77%) dari seluruh penyandang cacat. Yang lainnya adalah cacat netra 8 orang (12,31%), tuna rungu 8 orang (12,31%), psikotik 4 orang (6,15%), retardasi 8 orang (12,31%), cacat ganda 4 orang (6,15%). Ditinjau dari segi pendidikan, penyandang cacat tersebut paling banyak

berpendidikan tingkat SLTP. Secara terperinci tingkat pendidikan mereka adalah sebagai berikut: tidak sekolah 7 orang (10,77%), tidak tamat SD 15 orang (23,08%), SD 3 orang (4,61%), Tidak tamat SLTP 13 orang (20,10%), SLTP 19 orang (29,23%), Tidak tamat SLTA 2 orang (1,54%), tidak diketahui 5 orang (7,69%)(Anonim,2000,hal 47).

b. Anak Jalanan

Anak jalanan yang terdeteksi di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan semuanya hanya berjumlah 8 orang. Anak jalanan tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. Kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari adalah mengamen. Usia mereka adalah 6 - 21 tahun ada 4 orang, 13 - 15 tahun ada 1 orang, 16 - 18 tahun ada 2 orang, dan 19-21 tahun ada 1 orang (Anonim,2000,hal.51).

c. Lanjut Usia Terlantar

Jumlah lanjut usia terlantar di Kelurahan Prawirodirjan berdasarkan data Dinas Sosial tahun 1999, seluruhnya berjumlah 19 orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 10 orang dan jenis kelamin perempuan 9 orang. Dilihat dari segi pendidikan, sebanyak 11 orang (57,89%) tidak pernah sekolah, dan 8 orang (42,11%) hanya berpendidikan SD. Kegiatan mereka sebagian besar (78,95%) menganggur, dan 4 orang (21,05%) bekerja. Para lanjut usia terlantar tersebut yang tinggal bersama anak-anaknya 8 orang (42,11%), dan mandiri 57,89%.

d. Anak Terlantar

Jumlah anak terlantar seluruhnya 14 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka berusia antara 13-15 tahun 3 orang, usia 16-18 tahun 2 orang, dan 19-21

ada 9 orang. Tingkat pendidikan yang dicapai tidak tamat SD 2 orang, tamat SD 3 orang, tidak tamat SLTP 1 orang, SLTP 7 orang, dan tidak tamat SLTA 1 orang. Status mereka adalah: yatim 2 orang, piatu 2 orang, tua masih lengkap 9 orang. Kegiatan sehari-hari lontang lantung 6 orang, membantu orang tua 2 orang, lainnya 6 orang (Anonim, 2000 a, hal.39).

e. Pengemis

Jumlah pengemis seluruknya 1 orang berjenis kelamin perempuan,

pendidikan SD, dan mempunyai keluarga (Anonim, 2000 a, hlm.41).

f. Pemulung

Jumlah pemulung 1 orang, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal menumpang (Anonim, 2000 a, hlm.43).

Untuk mengetahui secara keseluruhan proporsi penyandang PMKS di kelurahan Prawirodirjan tersebut dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 4
PMKS Di Kelurahan Prawirodirjan Tahun 1999

No	Jenis PMKS	Jumlah	%
1	Anak terlantar	14	12,96
2	Pengemis	1	0,93
3	Pemulung	1	0,93
4	Penyandang cacat	65	60,18
5	Lansia terlantar	19	17,59
6	Anak jaanan	8	7,41
	Jumlah	108	100,00

Sumber: data dan profil 5 penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Provinsi DIY Tahun 2000, hal 7. Dinas Sosial Tk I.

Berdasarkan data tentang penyandang PMKS di Kelurahan Prawirodirjan tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah penyandang cacat, sedangkan sebagian kecil termasuk kategori keterlantaran sosial ekonomi.

III. MASALAH KESEJAHTERAAN KELUARGA MIGRAN DI KELURAHAN PRAWIRODIRJAN KOTA YOGYAKARTA

A. Karakteristik Migran

Dari 30 orang responden Kepala

Keluarga migrant sebagian besar responden (93,33%) berjenis kelamin laki-laki, dan sebagian kecil lainnya perempuan. Usia mereka berkisar antara 20-60 tahun. Yang paling banyak adalah yang berusia antara 41-50 tahun (40,00%). Yang lainnya berusia antara 31-40 tahun (36,67%), antara 51-60 tahun (13,34%), antara 21-30 tahun (3,33%), demikian juga yang berusia 20 tahun dan 60 tahun masing-masing sebesar 3,33%.

Berdasarkan agama yang dianut oleh mereka pada umumnya (90%) adalah Islam, dan sebagian kecil lainnya (10%) beragama Katholik. Ditinjau dari segi lamanya bermukim di Kelurahan

Prawirodirjan, mereka telah bermukim antara 6 sampai dengan 25 tahun. Yang paling banyak adalah yang telah bermukim antara 11 sampai dengan 15 tahun (30 %). Yang lainnya telah bermukim antara 6 sampai dengan 10 tahun (26,67 %), antara 16 sampai 20 tahun (23 %), 21 sampai 25 tahun, dan di atas 25 tahun masing-masing sebanyak 10 %.

Berdasarkan daerah asal, pada umumnya mereka berasal dari berbagai daerah yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah asal mereka tersebut sebagian besar adalah Kabupaten Gunung Kidul (76,68 %), Bantul (3,33 %), Sukoharjo (6,67 %), Purwokerto (3,33 %), Magelang (3,33 %). Lainnya berasal dari daerah-daerah provinsi lain yaitu Pacitan Jawa Timur (3,33%), dan dari Padang (3,33%).

Dilihat dari segi pendidikan mereka sebagian besar (76,67%) hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan sebagian kecil lainnya adalah SLTP (13,33 %), SLTA (6,67 %), bahkan ada juga mereka yang tidak pernah memperoleh pendidikan di sekolah (3,33 %). Berdasarkan penggolongan suku bangsa, pada umumnya adalah suku Jawa (96,67 %), dan sebagian kecil suku Minang (3,33 %).

Status perkawinan pada umumnya (93,34 %) menikah, sebagian kecil lainnya berstatus tidak menikah dan janda masing-masing 3,33 %. Jumlah tanggungan keluarga berkisar antara 1 sampai 6 orang. Sebagian besar mereka mempunyai tanggungan keluarga antara 3 sampai 4 orang (56,67 %), lainnya adalah antara 5 sampai 6 orang (23,33 %), antara 1 sampai 2 orang (16,67 %), serta tanpa tanggungan 3,33%.

B. Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang Dihadapi Keluarga Migran Dan Upaya Mengatasinya

Menurut informasi dari para Tokoh Masyarakat, secara umum berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang disandang oleh para keluarga migran berdasarkan adalah sebagai berikut:

Berbagai masalah yang disandang oleh anak menurut sebagian besar responden Tokoh masyarakat (60%) adalah pendidikan, dan eksploitasi anak dikemukakan oleh sebagian kecil (40%) responden tersebut, dan ada juga yang mengatakan masalah kesehatan (40%).

Berbagai masalah sosial yang disandang oleh anak remaja yang dikemukakan oleh sebagian besar tokoh Masyarakat (60%) adalah mengenai lapangan pekerjaan. Di samping itu menurut mereka juga masalah pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak (40%), serta perilaku yang menyimpang (20%).

Berbagai masalah sosial yang disandang keluarga migran yang paling banyak adalah masalah lapangan kerja (60%), dan masalah kemiskinan (40%). Masalah lainnya adalah masalah yang dialami oleh para Lanjut Usia, menurut Tokoh Masyarakat adalah pemanfaatan waktu luang (60%), masalah kasih sayang (40%), serta relasi sosial (20%) dan kesehatan (20%).

Menurut para migran sendiri, berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh para keluarga migran dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dari hasil wawancara dengan Kepala keluarga migran dapat diketahui sebagai berikut:

1. Masalah Mata Pencaharian Hidup

Dari 30 orang responden Kepala Keluarga dapat diketahui pekerjaan

pokok mereka meliputi usaha sektor informal. Sebagian besar (73,24%) adalah berjualan makanan jajanan seperti rujak, mie bakso, es mie ayam, dan di samping itu ada juga yang berjualan barang kelontongan. Sebagian kecil (6,67%) bekerja di bidang jasa seperti petugas parkir dan bekerja di toko perkakas rumah masing-masing 3,33%, serta buruh (13,33%). Kiranya pekerjaan yang mereka lakukan tersebut hanya satu-satunya pekerjaan yang dapat memberinya nafkah, karena pada umumnya (90%) dari mereka tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Berdasarkan penghasilan bersih yang diperoleh mereka dalam sebulan besarnya bervariasi antara Rp.150.000,00.- sampai dengan Rp.450.000,00.-. Yang paling banyak adalah yang berpenghasilan antara Rp.250.000,00.- sampai Rp.350.000,00.- per bulan (50%). Yang lainnya adalah mereka yang berpenghasilan antara Rp.150.000,00.- sampai Rp. 250.000,00.- (40%), dan mereka yang berpenghasilan antara Rp.350.000,00.- sampai Rp. 450.000,00.- (10%). Dengan demikian pada umumnya (90%) hanya berpenghasilan antara Rp.150.000,00.- sampai Rp.350.000,00.- per bulan, sedangkan jumlah tanggungan sebagian besar adalah antara 3 sampai 6 orang. Ditinjau dari segi besarnya penghasilan tersebut dapat diketahui bahwa bilamana didasarkan pada upah minimum regional (UMR) DIY yang ditetapkan sebesar Rp.237.500,00.- yang berlaku pada tahun 2001 (Anonim, 2001 b), maka sebagian besar migran di daerah ini berpenghasilan di atas UMR tersebut.

Dalam hal mendapatkan pekerjaan sebagai mata pencaharian hidup sebagian besar migran mengatakan ada kesulitan, hanya sebagian kecil saja (16,67%) yang mengatakan tidak ada

kesulitan. Berbagai jenis kesulitan yang dialami dalam mencari pekerjaan sebagian besar dari mereka (63,33%) mengatakan karena tidak punya modal. Lainnya adalah karena tidak memiliki keahlian (13,33%), dan karena banyak saingan (6,67%). Upaya untuk mengatasi kesulitan dalam mencari pekerjaan mereka mengatakan dengan usaha dagang (48%), dan bilamana tidak memiliki modal usaha jalan keluar yang ditempuh adalah mencari pinjaman (20%), bekerja keras (8%), bekerja ikut orang lain (4%), dan tidak ada upaya (20%).

2. Masalah Pendidikan Anak

Masing-masing keluarga migran memiliki anak. Namun demikian ditinjau dari segi pendidikan ternyata ada anak-anak mereka yang berusia sekolah tidak bersekolah. Dari 30 orang migran, ada 5 orang (16,67%) yang masing-masing memiliki anak berusia sekolah tetapi tidak bersekolah, serta 2 orang (6,66%) yang masing-masing dua orang anaknya tidak bersekolah. Jumlah anak-anak mereka yang tidak sekolah hanya berkisar antara satu sampai dua orang. Dengan demikian sebagian besar (76,67%) anak-anak mereka sudah bersekolah. Adapun berbagai alasan mengapa anak-anak mereka yang masih berusia sekolah tersebut tidak bersekolah, berbagai macam alasan yang mereka kemukakan masing-masing adalah karena putus sekolah, semuanya sudah berkeluarga, sudah lulus SMK, kekurangan biaya, malu bersekolah karena sudah besar, membantu orang tua berjualan, kurang mampu berpikir.

Untuk menyekolahkan anak-anak mereka melalui pendidikan formal, sebagian besar keluarga migran mengatakan mengalami kesulitan, dengan jenis kesulitan masing-masing

yang berbeda-beda. Kesulitan tersebut menurut sebagian migran adalah karena kekurangan biaya (56,67 %), lainnya adalah karena kurang motivasi (3,33 %), dan lingkungan anak tidak mendukung (3,33 %) serta ada juga di antara mereka yang mengatakan tidak ada kesulitan (36,67 %).

Upaya mereka untuk mengatasi kesulitan dalam hal pendidikan anak seperti tersebut di atas, ada berbagai upaya yang mereka lakukan yaitu: mencari pinjaman (43,33 %), bekerja sebagai buruh (3,33 %), menggadaikan barang dan mencari pinjaman (3,33 %), menghemat dalam pengeluaran uang tetapi bila terdesak mencari pinjaman (3,33 %), isteri membantu orang lain yang berjualan di pasar (9,09 %). Namun demikian di antara mereka dalam mengatasi masalah tersebut ada juga yang tidak ada upaya (36,67 %).

Dari data tentang pendidikan anak seperti tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari berbagai kesulitan yang dihadapi migran dalam kaitan dengan pendidikan anak, jenis kesulitan yang paling banyak dirasakan adalah karena biaya yang tidak terjangkau, dan cukup banyak yang tidak berbuat apa-apa untuk mengatasinya.

3. Kesehatan Keluarga

Untuk mengetahui kondisi kesehatan keluarga migran pada saat penelitian ini dilaksanakan dapat dikemukakan kondisi kesehatan keluarga mereka sebagai berikut:

Ditinjau dari segi kesehatan Kepala Keluarga, pada umumnya (93,33%) berada dalam kondisi kesehatan yang cukup baik, hanya ada 2 orang (6,67%) yang mengatakan punya penyakit. Dilihat dari persentase kejadian sakit di antara anggota keluarga tersebut

persentase paling tinggi mempunyai penyakit adalah isteri responden, yaitu 14,29 % yang mengidap penyakit. Adapun menurut penuturan mereka penyakit yang diderita oleh responden Kepala Keluarga adalah muntaber dan uci-uci (sejenis tumor).

Mengenai kesehatan isteri responden, ada sebagian kecil yang mempunyai penyakit yaitu pusing-pusing (7,10%), kembung perut (3,60%), dan rematik (3,60%). Dengan demikian sebagian besar (85,70 %) isteri mereka berada dalam kondisi sehat. Demikian juga mengenai kesehatan anak-anak mereka pada umumnya (96,37%) berada dalam kondisi sehat, hanya ada satu orang responden yang mengatakan bahwa satu orang anak mereka sakit amandel (3,33%).

Dalam upaya mengobati penyakit yang diderita seperti tersebut ada berbagai cara yang dilakukan oleh mereka mereka. Dari tujuh orang responden yang mengatakan dirinya dan anggota keluarganya ada yang sakit, mengemukakan bahwa dalam upaya penyembuhannya dengan cara: berobat jalan ke Rumah Sakit tetapi tidak tuntas (14,29%), minum obat yang dibeli dari warung (28,57%) berpantang makanan (14,29%), dengan cara dipijat (14,29%), berobat ke Posyandu (14,29%), dan opname di rumah sakit (14,29%). Dalam upaya penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh keluarga migran seperti tersebut ada berbagai kesulitan yang dialami yaitu: biaya dirasakan mahal (26,67%), ada juga yang mengatakan prosedur berbelit (3,33%). Namun demikian sebagian besar dari mereka mengatakan tidak ada kesulitan (70%).

Mereka yang mengatakan mengalami kesulitan dalam upaya

pengobatan penyakit yang mereka derita juga berupaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan seperti tersebut adalah dengan cara mencari pinjaman kepada tetangga, membeli obat di warung, berobat ke Posyandu dan pijat, tidak makan daging tempe dan sayur. Dan ada juga yang mengatakan tidak ada upaya.

4. Pemenuhan Kebutuhan Sandang Pangan

Secara umum kebutuhan pokok makan sehari-hari dalam keluarga dapat dikatakan sudah terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari apa yang mereka kemukakan seperti: frekuensi makan dalam satu hari antara dua sampai tiga kali, dan pada umumnya (93,33%) tiga kali makan. Demikian juga ditinjau dari segi variasi jenis makanan yang disajikan pada masing-masing keluarga dengan menu makanan sebagai berikut: nasi dan sayur (63,33%); nasi, sayur, ikan/ daging/ tahu/ tempe (26,67%); nasi, sayur, ikan / daging / tahu tempe dan buah (10%).

Ditinjau dari cukup tidaknya makanan yang disajikan di dalam keluarga, sebagian besar dari mereka (63,33%) mengatakan cukup, dan sebagian kecil (36,67%) mengatakan belum mencukupi. Mereka yang mengatakan makanan yang dikonsumsi keluarga belum mencukupi, mengemukakan alasan yang berbeda-beda yaitu: bahan makanan yang dibutuhkan mahal (9,09%), penghasilan kurang mencukupi (45,45%), penghasilan tidak tetap (9,09%), belum memenuhi kategori empat sehat dan lima sempurna (36,36%).

Dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pakaian untuk anggota keluarga migran pada umumnya (90%) masih memiliki pakaian yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya 10% dari

responden Kepala Keluarga migran yang mengatakan tidak memenuhi. Dalam waktu satu tahun mereka dapat membeli pakaian minimal satu stel. Secara terperinci jumlah pakaian yang dibeli oleh masing-masing responden adalah sebagai berikut: yang dapat membeli satu stel dan dua stel masing-masing sebanyak 36,67%, mereka yang dapat membeli tiga stel dan lebih dari 3 stel masing-masing sebanyak 13,33%.

Mengenai pakaian anak sekolah sebagian besar (86,67%) mengatakan sudah mencukupi, sedangkan yang mengatakan belum mencukupi hanya 13,33%. Adapun yang menjadi alasan belum cukupnya pakaian sekolah anak-anak mereka sebagian karena buruh kecil karena penghasilan tidak tetap dan lainnya mengatakan bahwa yang ada lebih diutamakan yang diutamakan adalah biaya untuk kebutuhan sehari-hari.

5. Pemukiman

a. Perumahan

Ditinjau dari segi peruntukan wilayah pemukiman di mana kaum migran bermukim pada umumnya (90%) mereka menempati wilayah peruntukan pemukiman, dan hanya sebagian kecil (10%) dari mereka yang menempati wilayah perkantoran/ perdagangan.

Kondisi pemukiman sebagian besar (56,67%) adalah daerah padat penduduk di mana antar rumah yang satu dengan yang lainnya berdekatan dan hanya ada jalan setapak sebagai sarana lalu lalang para pemukim. Sebagian kecil lainnya adalah dengan kondisi sangat padat dengan kondisi saling berhimpitan dan tidak mempunyai halaman (30%), serta sebagian kecil lainnya (13,33%) yang menempati wilayah tidak padat di mana

mereka memiliki halaman dan jalan yang dapat dilalui mobil.

Pada waktu pertama kali datang di tempat yang baru, pada umumnya untuk mendapatkan tempat tinggal mereka mengontrak rumah (90%), sebagian kecil dari mereka (6,67%) menumpang di rumah teman. Di samping itu ada juga yang mengatakan menumpang di rumah saudara (3,33%).

Status kepemilikan rumah yang ditempati para migran sebagian besar (73,34%) berstatus rumah kontrakan. Sebagian kecil lainnya adalah milik sendiri (10%), sewa bulanan (10%), sewa harian (3,33%), dan dengan status menumpang di rumah teman (3,33%).

Pada sebagian kecil responden yang berstatus migran sirkuler yaitu para keluarga yang tidak membawa anggota keluarga. Dalam satu rumah yang berpenghuni sampai 30 orang, mereka adalah para Kepala Keluarga yang tidak membawa anggota keluarga. Oleh karena itu mereka kembali pulang ke kampung masing-masing sekitar satu bulan sekali.

Jumlah penghuni dalam satu rumah, sebagian besar dari mereka (83,33%) antara satu sampai lima orang, sedangkan sebagian kecil (17,37%) mengatakan lebih dari lima orang.

Ada berbagai macam kesulitan yang dihadapi dalam hal masalah tempat tinggal. Sebagian besar mengatakan tempat tinggal terlalu padat (80%). Selain itu juga sebagian kecil dari mereka mengatakan karena terlalu bising (20%), dan karena lingkungan kotor (10%). Hanya beberapa orang saja yang mengatakan tidak ada kesulitan dalam hal rumah tinggal (6,67%).

Dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan perumahan

kiranya yang paling banyak adalah menerima apa adanya (90%), dan (10%) mengharapkan bantuan dari Dinas Sosial. Lainnya adalah dengan cara membersihkan ruangan supaya sehat, tidur di ruang tamu, tidur di lantai, cari tempat lain yang lebih luas, sudah terbiasa di rumah sempit, menerima apa adanya. Kondisi perumahan yang mereka tempati dapat dikemukakan sebagai berikut:

Luas rumah pada umumnya antara 10- 90 m². Hanya sebagian kecil saja (16,67%) dari mereka yang menempati rumah dengan ukuran lebih dari 90 m². Yang paling banyak adalah yang menempati rumah berukuran antara 11-20 m² sebanyak 26,67%, lainnya berukuran antara 21-90m².

Sebagian besar rumah yang ditempati oleh migran (73,33%) adalah rumah dengan dinding tembok, lainnya adalah rumah dengan dinding bambu (20%), gedeg tripleks (3,33%), dan rumah setengah tembok (3,33%). Lantai rumah sebagian besar (80%) menggunakan plester semen, ubin tegel (16,67%), dan ada juga yang hanya berlantai tanah (3,33%), sedangkan atapnya semuanya terbuat dari genteng.

Rumah yang mereka tempati pada umumnya memiliki ventilasi cukup baik, sebagian kecil saja (20%) yang rumahnya kurang ventilasi. Ditinjau dari segi masuknya sinar matahari ke dalam rumah, sebagian besar (56,67 %) cukup terang, sebagian kecil terang (36,67%), dan hanya 6,67% yang rumahnya kurang sinar matahari.

Mengenai sumber penerangan di dalam rumah yang mereka tempati semuanya telah menggunakan sumber daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara.

b. Sanitasi Pemukiman

1). Penggunaan Air Minum

Untuk konsumsi air minum mereka semuanya menggunakan air sumur baik sumur pompa maupun sumur gali tradisional. Sebagian besar yang digunakan adalah sumur gali dengan menggunakan timba yang dibuat di luar rumah (60%), sumur gali yang dibuat di dalam rumah (26,27%), dan sumur pompa (13,33%). Kedalaman sumur bervariasi, sedangkan yang terbanyak adalah dengan kedalaman antara enam sampai sepuluh meter (43,33%). Yang lainnya dengan kedalaman kurang dari 6 meter (13,33%), antara 11 sampai 15 meter (3,33%), lebih dari 16 meter (13,33%). Sebagian kecil responden (26,67%) mengatakan tidak mengetahui berapa kedalamannya.

2). Kesehatan Lingkungan pemukiman

Ditinjau dari segi kesehatan lingkungan pemukiman diketahui bahwa hanya sebagian kecil (13,33%) sudah menggunakan septik tank untuk pembuangan kotoran, dan sebagian besar menggunakan lobang di tanah (76,67%). Sedangkan yang lainnya membuang kotoran di sungai masing-masing sebesar 10%.

Lingkungan pemukiman sebagian besar sudah dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Saluran pembuangan air limbah tersebut ada yang telah ditembok secara permanen (20%), setengah permanen (76,67%), serta parit tanpa tembok (3,33%). Saluran air limbah tersebut dilihat kondisinya sebagian besar (66,67%) dapat mengalirkan air limbah dengan lancar, dan sebagian kecil (33,33%) airnya meluap.

Untuk pembuangan limbah rumah tangga berupa sampah, sebagian besar

dari mereka (86,67%) menyediakan bak sampah di halaman rumah masing-masing, dan hanya sebagian kecil saja (13,33%) membuang sampah di tempat-tempat berupa bak penampungan sampah umum.

IV PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pelayanan Dari Pemerintah

Meskipun program pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintah di daerah setempat belum diprogramkan secara khusus untuk kaum migran, tetapi mereka mengatakan telah mendapatkan beberapa pelayanan dari pemerintah misalnya di bidang pendidikan anak mereka ada yang telah mendapatkan keringanan biaya sekolah bagi anak-anaknya. Hal ini dikemukakan oleh sebagian kecil responden (20%), dan bea siswa untuk anak (3,33%), paket peralatan sekolah (13,33%) telah mendapatkan latihan keterampilan (6,67%), sedangkan 56,67% mengatakan tidak ada. Di bidang kesehatan mereka juga mendapat bantuan berupa keringanan biaya berobat (3,33%), dan Posyandu (50%). Di bidang ekonomi sebagian besar dari mereka telah mendapatkan berbagai bantuan seperti: modal usaha (13,33%), bantuan sembako (40%) bantuan perbaikan rumah (3,33%), bantuan dari program JPS (3,33%), dan bantuan beras murah setiap bulan (3,33%).

Pelayanan sosial seperti tersebut di atas, sejalan dengan yang dikemukakan oleh tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan sosial yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang terkait dengan pendidikan orang dewasa dibuka paket A dan B (pendidikan masyarakat). Sedangkan untuk kesehatan anak dengan cara peningkatan pelayanan kesehatan terpadu dan JPS kesehatan serta penyuluhan kesehatan.
2. Bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menyandang kemiskinan diatasi dengan menerapkan program KUKESRA, JPS, PDM, DKE, P2KP. Sedangkan bagi keluarga yang bermasalah dengan lapangan kerja, pemecahannya dengan kelompok Usaha Bersama (KUBE).
3. Untuk mengatasi permasalahan para lanjut usia dilaksanakan pelayanan Lansia Terpadu.

Di Kelurahan Prawirodirjan yang menjadi sasaran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial seperti tersebut di atas adalah : anak putus sekolah, pengangguran, pengamen, pencuri, pengemis, remaja putus sekolah, keluarga/ rumah tangga, fakir miskin, dan lanjut usia tidak mampu. Metode yang digunakan dalam penanganan masalah tersebut adalah sarsehan di RT, RW, pengumpulan pendapat dan masalah, memandirikan masyarakat setelah bantuan-bantuan yang datang dari mana saja diterima.

B. Pelayanan Dari Organisasi Non Pemerintah

Selain pelayanan sosial yang diberikan oleh organisasi pemerintah, sebagian kecil responden (13,33%) juga mengatakan pernah mendapatkan pelayanan sosial dari organisasi non pemerintah seperti dari Organisasi

sosial/LSM . Misalnya di bidang pendidikan untuk anak mereka memperoleh bantuan biaya sekolah (10%), bantuan baju seragam sekolah (3,33%). Di bidang kesehatan bantuan yang pernah diterima antara lain bantuan obat-obatan (6,67 %), bantuan biaya berobat (3,33%), serta semprotan demam berdarah (20%). Secara ekonomi, bantuan yang pernah diterima adalah bantuan modal usaha (3,33%), dan bantuan sembako (10%) , dan lainnya mengatakan tidak ada.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Sosial

Menurut keterangan dari pejabat dari Dinas Sosial Kotamadya Yogyakarta, sampai dengan tahun 2001 di daerah setempat belum ada program penanaman yang dirancang secara khusus diperuntukan komunitas migran. Namun demikian pelayanan kepada mereka terintegrasikan pada program-program pelayanan terhadap penduduk kota Yogyakarta secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi hambatan pelayanan pemerintah kepada penyandang masalah sosial antara lain :

1. Personil yang profesional dalam melayani masyarakat jumlahnya belum mencukupi. Namun demikian untuk mengatasi masalah ini telah diupayakan dengan cara memprogramkan pendidikan dan latihan serta kursus.
2. Pengadaan perangkat lunak yang berkaitan dengan metode pelayanan yang profesional kepada masyarakat belum dimiliki. Untuk pemecahan masalah ini mengacu kepada petunjuk pelaksanaan teknis yang disusun oleh eks Kantor Wilayah Departemen Sosial.

3. Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan sosial jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus dilayani.
4. Sarana dan prasarana khususnya untuk pengangkutan orang terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang sakit jiwa terbatas sehingga pelayanan lamban.

D. Faktor Pendukung Dalam Pelayanan Sosial

Salah satu faktor dalam upaya pelayanan sosial di kota Yogyakarta menurut pejabat dari Dinas Sosial setempat adalah adanya berbagai Lembaga Sosial yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak seperti Organisasi sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna.

E. Aspirasi Terhadap Pelayanan Sosial

Aspirasi pelayanan sosial yang dimaksud dalam kaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial kelompok migran ini adalah harapan-harapan atau keinginan-keinginan atau yang dicita-citakan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang, serta upaya-upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk mencapainya.

Berbagai harapan, keinginan komunitas migran beserta para Tokoh Masyarakat setempat pada hakekatnya merupakan aspirasi di mana upaya-upaya pelayanan sosial bagi mereka harus terintegrasi dalam pelaksanaannya antara apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dengan hak dan kewajiban pemerintah di dalam upaya peningkatan sosial komunitas migran di daerah setempat.

Aspirasi komunitas migran di bidang pelayanan sosial tentang apa

dilakukan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang dikemukakan mereka, pada umumnya tidak dapat memahaminya namun ada di antaranya yang mengemukakan yang mana harapan mereka berintikan keinginan untuk mendapatkan bantuan sosial yang meliputi beasiswa untuk anak sekolah pemerintah hendaknya membangun perumahan yang dapat terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Pendapat mereka tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagian besar dari mereka juga mengatakan bahwa untuk keluar dari kehidupan yang serba kekurangan harus diberi modal usaha (63,33 %). Di samping itu sebagian kecil dari mereka mengatakan harus ada pembinaan usaha (3,33 %), dan bantuan biaya sekolah (33,33 %). Sebagian kecil lainnya tidak mengemukakan apa yang menjadi aspirasi mereka.

Keberadaan Tokoh Masyarakat di tengah warga khususnya komunitas migran mempunyai peran yang cukup banyak dalam upaya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kondisi kesejahteraan warganya. Dari ke lima Tokoh Masyarakat tersebut berbagai aspirasi yang dikemukakan oleh mereka dalam menangani permasalahan sosial yaitu bahwa:

1. Pemerintah harus memberikan fasilitas berupa tenaga teknis dan dana untuk memecahkan masalah dan bantuan dana sesuai kebutuhan dalam rangka upaya bimbingan meningkatkan swadaya masyarakat;
2. Pemerintah juga harus memonitor dan mengevaluasi program-program bimbingan peningkatan swadaya masyarakat tersebut;

3. Dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat;
4. Pemerintah memprogramkan kursus-kursus keterampilan, serta penyuluhan dengan materi yang sesuai dengan kondisi lingkungan misalnya tentang hukum, keamanan, bahaya narkoba, kesehatan keluarga maupun lingkungan pemukiman, dan lain-lain;
5. Masyarakat dapat membentuk lembaga kemasyarakatan untuk memberdayakan warga, serta mengusahakan dana dan tenaga teknis untuk membantu kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
6. Penanganan masalah sosial oleh masyarakat hendaknya menyeluruh tidak sepotong-sepotong dan harus bersifat aspiratif, responsif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
7. Masyarakat hendaknya meningkatkan hidup damai, serta meningkatkan kegotong royongan di antara sesama warganya;
8. Masyarakat diharapkan dapat menegakan norma-norma yang dalam hal ini norma sosial yang mengatur hidup untuk menjadi warga yang baik sesuai ajaran agama dan hukum yang berlaku;
9. Masyarakat Dunia Usaha aktif menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga.

Berbagai aspirasi yang dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat tentang keikutsertaan masyarakat/ LSM

di dalam penanganan masalah sosial keluarga migran di daerah perkotaan seperti tersebut di atas kiranya sejalan dengan arahan dari pemerintah seperti yang dapat dilihat pada butir-butir yang tercantum pada petunjuk pelaksanaan pembinaan Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial R.I. nomor 78 Tahun 1993, di mana ditetapkan antara lain tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi ORSOS/LSM sebagai berikut:

1. *Kedudukan: sebagai wadah/ wahana partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh warga negara/ masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.*
2. *Tugas pokok :*
 - a. *Sebagai mitra yang membantu dan bersama-sama pemerintah melakukan usaha penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip swadaya dan swausaha;*
 - b. *Sebagai motivator dan dinamisator peran serta masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial*
 - c. *Membina dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah demi terlaksananya program Usaha Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. *Fungsi:*
 - a. *Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial secara dinamis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip keswadayaan menuju kemandirian;*

b. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya ORSOS/ LSM wajib mengutamakan kepentingan nasional, menjaga dan memelihara integritas bangsa dan ketahanan nasional berdasarkan Pancasila.

F. Sumber Daya Dan Potensi Sosial Dalam Upaya Penanganan Masalah Sosial Keluarga Migran

1. Sumber Daya Sosial

Istilah sumber daya menurut Arthur Dunham bukan hanya meliputi perwakilan-perwakilan sosial dan kesehatan, tetapi juga berbagai organisasi, kelompok-kelompok, dan perorangan, staf, personel, peralatan fisik, perundang-undangan, dana, kepemimpinan, peran serta

sukarelawan, materi fakta, pengertian publik, kemauan yang baik, dan kapasitas untuk menyatukan aksi perencanaan (Dunham, A, 1965, hal. 25).

Untuk menangani masalah sosial di kalangan keluarga migran diperlukan informasi tentang berbagai sumber dan potensi sosial yang menunjang dalam pemecahan masalah yang disandang. Dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat berbagai sumber dan potensi sosial yang ada di Kelurahan Prawirodirjan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data tahun 2001 yang dapat dihimpun dari kantor Kelurahan Prawirodirjan, sumber daya dan potensi sosial yang ada di Kelurahan Prawirodirjan dapat dikemukakan dalam table sebagai berikut:

No	Jenis Sumber Daya	Bentuk Dan Jumlah
1	Organisasi Sosial	- Pramuka Gugus Depan: 3596 orang; - Karang Taruna 40 anggota; - PSM 19 anggota; - Kelompok PKK 28 anggota; Dasa Wisma 500 anggota.
2	Kesenian	- Paduan suara 2 kelompok; - Orkes Melayu 1 perkumpulan; - Kesenian Daerah 6 perkumpulan; - Band 2 perkumpulan
3	Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	- Dokter 3 orang; Perawat 5 orang; Bidan 3 orang.
4	Penduduk Yang Bekerja	- PNS 354 orang; - ABRI 3 orang; - Swasta 1154 orang; - Wirausaha/ Dagang 655 orang; - Pertukangan 182 orang; - Pensiunan 401 orang; - Pekerja di bidang Jasa 61 orang.

No	Jenis Sumber Daya	Bentuk Dan Jumlah
5	Organisasi Keagamaan	- Majelis Ta'lim 7 kelompok (285 anggota); - Majelis Gereja 3 kelompok (650 anggota); - Remaja Mesjid 7 kelompok (210 anggota); - Remaja Gereja 3 kelompok (110 anggota); - Remaja Buddha 1 kelompok (30 anggota).
6	Kelembagaan	- Pengurus LKMD 37 orang; - Kader Pembangunan Desa 15 orang; - Kader PKK 36 orang.
7	Sumberdaya Ekonomi	-Pasar lingkungan 2 buah; -Toko 112 buah; -Warung 54 buah; -Pedagang kaki lima 240 buah; -Industri besar 8 buah; -Industri Rumah Tangga 43 buah.
8	Jasa	- Jasa Bank 4 buah; - Notaris 1 buah - Pengacara 1 buah

2. Potensi Sosial Untuk Penanganan Masalah Anak

Masalah anak yang ada adalah putus sekolah karena kondisi ekonomi orang tua kurang mampu. Orang tua memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Masalah lainnya adalah anak jalanan. Mereka bekerja sebagai tukang parkir, peminta-minta dan pengamen. Berbagai sumber dan potensi sosial yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan masalah anak tersebut menurut Tokoh Masyarakat seperti guru, GNOTA, LSM, JPS, Tokoh Masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang terwujud di dalam program-program dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya untuk mengatasi masalah kesehatan anak, di daerah ini sudah tersedia Pos Pelayanan Terpadu bagi Balita. Mengena i masalah remaja seperti masalah pengangguran, putus sekolah dan

sulitnya lapangan pekerjaan serta dalam hal pemanfaatan waktu luang, dikatakan bahwa sumber yang dapat dimanfaatkan adalah program pemerintah, LSM serta organisasi pemuda seperti Karang Taruna yang antara lain dapat memberikan kesibukan kepada anak-anak remaja guna mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif.

3. Potensi Sosial Dalam Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Keluarga/Rumah Tangga

Sumber-sumber dan potensi sosial yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi sosial ekonomi adalah Tokoh Masyarakat, Dinas Terkait, dan LSM.dengan pemanfaatan program JPS, USEP, P2KP dan sebagainya.

4. Potensi Sosial Dalam Penanganan Masalah Lanjut Usia

Sumber-sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan adalah LSM, Tokoh

Masyarakat, PKK, Dokter, dan Dinas terkait, sedangkan potensi yang dapat diwujudkan adalah Pelayanan terpadu Lanjut Usia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab lebih dahulu, dapat disimpulkan beberapa hal seperti berikut:

1. Ditinjau dari segi karakteristik migran, migrasi masuk ke kota Yogyakarta berdasarkan data tahun 1995 dibandingkan dengan data tahun 1999 ada kenaikan sebesar 0,09 %. Sebagian besar atau 76,68% migrant yang bermukim di Kelurahan Prawirodirjan berasal dari kota-kota yang berada di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya sebagian kecil yang berasal dari provinsi lain yaitu Jawa Timur dan Sumatera Barat. Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar atau 76,67% migran hanya berpendidikan SD dan paling tinggi berpendidikan SLTA sebesar 6,67%. Lainnya berpendidikan SLTP sebanyak 13,33%, dan tidak pernah sekolah 3,33%. Ditinjau dari segi pekerjaan, sebagian besar atau 73,24% bekerja sebagai pedagang makanan keliling, sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai buruh baik di bidang jasa maupun pengrajin perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya.
2. Permasalahan ekonomi adalah yang paling banyak dihadapi oleh sebagian besar migran adalah masalah sulitnya mencari nafkah. Untuk usaha dagang mereka tidak memiliki modal, di samping itu juga tidak mempunyai keterampilan yang memadai dan banyak saingan. Dengan demikian masalah migran yang utama dapat dikaitkan dengan masalah kemiskinan.
3. Permasalahan pendidikan anak yang saat ini dihadapi oleh kaum migran, hanya dikemukakan oleh sebagian kecil migran yaitu bahwa: pendidikan anak yang tidak dapat berlanjut karena biaya pendidikan tidak terjangkau di samping ada pula yang anaknya kurang mampu mengikuti pelajaran. Alasan lain karena anak membantu orang tua mencari nafkah.
4. Mengenai kesehatan yang dirasakan oleh anggota keluarga pada umumnya berada dalam kondisi yang cukup baik. Adapun mereka yang menderita penyakit, sebagian besar dari mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal berobat. Sedangkan mereka yang mengalami kesulitan karena mereka merasa biaya berobat mahal.
5. Ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan sandang pangan pada umumnya mereka sudah merasa cukup.
6. Mengenai perumahan, rumah yang mereka tempati sebagian besar berstatus rumah kontrakan, sedangkan hanya sebagian kecil saja yang berstatus rumah milik pribadi, menyewa, dan ada juga yang menumpang di rumah teman. Masalah yang mereka rasakan sehubungan dengan rumah tinggal adalah bahwa rumah yang dihuni bukan rumah milik sendiri.
7. Pelayanan Sosial yang diberikan baik yang diberikan oleh pemerintah

maupun organisasi non pemerintah kepada mereka antara lain berupa bantuan modal usaha melalui program "Jaring Pengaman Sosial", bantuan biaya sekolah dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA).

8. Aspirasi migran dalam pelayanan sosial pada umumnya berkaitan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi untuk mendapatkan biaya sekolah anak dan masalah perumahan. Untuk itu mereka mengharapkan bantuan modal usaha. Sedangkan para Tokoh Masyarakat menganggap bahwa sebaiknya peningkatan kesejahteraan sosial keluarga migran dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dengan sasaran antara lain dengan bimbingan kegotongroyongan dan kerukunan antar warga masyarakat, serta penegakan norma sosial dengan penyuluhan berbagai hukum dan peraturan.
9. Beberapa faktor penghambat dalam pelayanan sosial yang menjadi penghambat yang dialami oleh lembaga pemerintah terkait dalam upaya pelayanan sosial bagi penduduk di daerah setempat antara lain belum ada tenaga profesional, belum ada metode pelayanan yang efektif, dan keterbatasan dana.
10. Faktor Pendukung dalam upaya pelayanan sosial adalah adanya prasarana sosial yang cukup banyak seperti organisasi sosial, dan lembaga-lembaga keagamaan

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dalam upaya

mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi diperlukan berbagai penanganan yang meliputi :

1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Penanganan dengan cara pemberdayaan keluarga, khususnya di bidang sosial ekonomi. Dengan ekonomi yang cukup mantap memungkinkan mereka dapat berumah layak dan dapat menyekolahkan anak-anaknya, minimal wajib belajar sembilan tahun. Upaya ini ditempuh karena secara sosiologis, keluarga inti merupakan kelompok masyarakat terkecil di mana seseorang dibesarkan. Di dalam keluarganya untuk pertama kalinya seseorang belajar norma dalam perkembangan kemudian untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyesuaikan diri dengan norma masyarakat di mana mereka berada.

2. Pencegahan Timbulnya Masalah Sosial Baru

Perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan timbulnya masalah-masalah sosial lain yang pada suatu saat dapat menimpa mereka antara lain berbagai bentuk kenakalan remaja. Di samping itu jumlah penduduk yang akan semakin bertambah banyak di kemudian hari akan mengakibatkan angka kepadatan penduduk yang makin tinggi, tidak ada tempat bermain anak-anak mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan fisik di kota Yogyakarta dan khususnya di Kelurahan Prawirodirjan. Masalah perumahan yang sulit dijangkau oleh penduduk berpenghasilan rendah, dan kemudian rumah yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga akan menghasilkan perilaku kumuh.

3. Perencanaan

Ditinjau dari segi perencanaan, dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga kota Yogyakarta, perencanaan

secara fisik dan sosial harus selaras dan ada kaitan satu sama lain. Oleh karena itu dalam merencanakan program-program yang akan diterapkan pada komunitas migran di Kelurahan Prawirodirjan agar dapat mendukung perkembangan kota Yogyakarta di masa mendatang. Khususnya dalam upaya penanggulangan masalah sosial dengan segala penyertanya, sehingga suatu program yang direncanakan secara tepat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan komunitas setempat. Di dalam praktek, salah satu tujuan dalam perencanaan kota adalah menghapus kemiskinan kota, dengan demikian agar perencanaan sosial kota dikembangkan ke arah upaya-upaya perencanaan yang merupakan konsekuensi terhadap kondisi-kondisi di mana kota Yogyakarta menjadi tujuan migran dari daerah pedesaan untuk tujuan perbaikan hidup.

4. Pemugaran Pemukiman

Dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah kumuh, antara lain dapat ditempuh dengan cara pembangunan rumah murah yang terjangkau oleh komunitas golongan ekonomi lemah. Demikian juga agar relokasi pada berbagai komunitas di daerah kumuh agar dapat memecahkan masalah-masalah sosial, dan program-programnya disusun dan dianggarkan secara nasional.

5. Metode Penanganan

Dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial migran di Kelurahan Prawirodirjan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial yang mengarah pada antar aksi sosial, baik antar manusia maupun dengan sistem-sistem serta masalah-masalah yang dihadapi dalam memfungsikan individu maupun

sistem sosial. Sehubungan dengan hal-hal seperti tersebut kiranya suatu metode penanganan yang dianggap layak diterapkan sesuai dengan kondisi permasalahan mereka dalam peningkatan swadaya keluarga di bidang ekonomi adalah melalui bimbingan organisasi masyarakat (sebagai terjemahan dari istilah *community organization*). Yang dimaksud dengan *community organization* atau dalam istilah kepustakaan ilmu pekerjaan sosial di Indonesia, beberapa pakar menerjemahkannya dengan bimbingan organisasi masyarakat ialah "salah satu metode pekerjaan sosial yang pelaksanaannya membimbing suatu masyarakat agar dapat mengatasi kebutuhannya sendiri dengan *berswasembada*, yaitu dengan menggali atau mengerahkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri" (Sumhudi, M., Isom, 1972, hal. 538). Arthur Dunham di dalam bukunya berjudul *community Welfare Organization, Principle And Practice* mendefinisikan *community organization* sebagai "suatu proses untuk membawa dan mempertahankan penyesuaian antara kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial di suatu wilayah geografis atau suatu bidang pelayanan tertentu" (Dunham, Arthur, 1965, hal. 33). Dengan bantuan yang diberikan seperti tersebut masyarakat dapat membantu dirinya sendiri. Penerapan metode ini dengan pertimbangan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial migran tersebut jumlahnya cukup banyak sehingga tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat dan hanya oleh beberapa orang saja. Penanganan masalah kesejahteraan

sosial migran menyangkut sebagian besar anggota masyarakat setempat maupun masyarakat lainnya, karena itu penanggulangannya harus dilakukan bersama-sama oleh anggota-anggota masyarakat.

Antropologi, Aksara Baru, cetakan kelima, Jakarta.

Nugroho, T, Sumarno, 1987: Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, Cetakan kedua.

Sumhudi, M. Isom, 1972: Community Organization, Sosialia, Jakarta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim, 1995: Profil Kependudukan Indonesia, Supas 1995, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
-, 1998: Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Hasil Registrasi Penduduk Pertengahan Tahun 1998, Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
-, 1999: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 1999, Biro Pusat Statistik D.I. Yogyakarta.
-, 2000 a : Data Dan Profil Lima Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999, Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
-, 2000 b : Kecamatan Gondomanan Dalam Angka Tahun 2000, Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta.
-, 2001 a : Data Monografi Semester I Tahun 2001, Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan Kotamadya Yogyakarta.
-, 2001 b: Nasib Baik Belum Tentu Berpihak Pada Buruh, Surat Kabar Harian, Kompas, Senin 19 November 2001.
-, 2001 c: Statistik Kesejahteraan Sosial 2001, Biro Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia.
- Dunham, Arthur, 1965: Community Welfare Organization, Principles and Practice, Thomas Y Crowell Company, New York, Fifth Printing, New York.
- Barclay, George, W. 1983: Teknik Analisa Kependudukan, P.T. Bina Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1974: Pengantar